

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN MANDING
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
BAB III	8
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	8
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	8
3.1.1. Pendapatan - LRA	8
3.1.2. Belanja	8
3.1.3. Pendapatan - LO	9
3.1.4. Beban	9
3.1.5. Aset	9
3.1.6. Kewajiban	13
3.1.7. Ekuitas Dana	13
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	14
BAB IV	15
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	15
BAB V	16
PENUTUP	16

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Manding sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Nomor 16 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan diatas. Aspek keuangan pada Tahun 2023 ini yang pertama menggunakan sistem Anggaran Kinerja . Anggaran Kinerja pada prinsipnya meliputi 3 Komponen Pokok yaitu :

- (1) Komponen Pendapatan
- (2) Komponen Belanja Daerah
- (3) Komponen Pembiayaan

Secara terperinci untuk Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung hanya menyajikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan sebagai Berikut :

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KELURAHAN MANDING TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	0	0	
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Pendapatan Retribusi sewa Balai Kelurahan	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
KELURAHAN MANDING
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	0	0	
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Pendapatan Retribusi sewa Balai Kelurahan	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	

Dari tabel diatas secara keseluruhan target pendapatan dapat terealisasi sebesar 0 % atau sebesar Rp. 0 dari target pendapatan sewa Gedung Pertemuan / Balai Kelurahan Manding pada tahun 2023 dan tidak memenuhi target Pendapatan Gedung.

REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD
KELURAHAN MANDING
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
BELANJA DAERAH	447.886.400	441.033.211	98,46
BELANJA OPERASI	439.886.400	433.033.211	98,44
-BELANJA PEGAWAI	2.900.000	2.900.000	100,00
-BELANJA BARANG DAN JASA	436.986.400	430.133.211	98,43
-BELANJA MODAL	8.000.000	8.000.000	100,00
JUMLAH BELANJA	447.886.400	441.033.211	98,46

Dalam pelaksanaan APBD 2023 realisasi belanja Kelurahan Manding Temanggung mencapai 98,46% atau Rp. 441.033.211 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 447.886.400 yang terperinci belanja operasi sebesar Rp. 433.033.211 dari target yang ditetapkan Rp. 439.886.400 dan belanja modal Rp. 8.000.000,- dari target Rp. 8.000.000,-

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan
- b. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan.
- c. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Tahun 2023 APBD pada Kelurahan Manding tidak ada penetapan target pendapatan.

3.1.2. Belanja

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5	BELANJA DAERAH	441.033.211	1.012.488.816
51	BELANJA OPERASI	433.033.211	1.012.488.816
5101	Belanja Pegawai	2.900.000	2.250.000
5102	Belanja Barang dan Jasa	430.133.211	1.010.238.816
52	BELANJA MODAL	8.000.000	0
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000	0
	JUMLAH BELANJA	441.033.211	1.012.488.816

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp 441.033.211 atau tercapai 98,46% dari target sebesar Rp 447.886.400, sedangkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.012.488.816

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.900.000 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 2.900.000, sedangkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.250.000

- Belanja Barang dan jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 430.133.211 atau 98,43 % dari anggaran sebesar Rp. 436.986.400, sedangkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.010.238.816
- b. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.000.000 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 8.000.000, sedangkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 tidak ada anggaran maupun realisasi belanja modal

3.1.3. Pendapatan - LO
Kelurahan Manding Pendapatan nihil.

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	TA. 2023	TA. 2022
8	BEBAN DAERAH	462.903.865,64	1.062.493.292,06
81	BEBAN OPERASI	462.903.865,64	1.048.493.292,06
8101	Beban Pegawai	2.900.000,00	2.250.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	426.576.340,00	1.008.508.195,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	33.427.525,64	37.735.097,06
	Jumlah Beban	462.903.865,64	1.062.493.292,06

Jumlah beban Kelurahan Manding pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 462.903.865,64, sedangkan jumlah beban pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.062.493.292,06

3.1.5. Aset
a. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	Tahun Anggaran 2023 (Rp.)	Tahun Anggaran 2022 (Rp.)
b. Kas di Bank	0	0
c. Kas di Bendahara	0	0

Pengeluaran		
d. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp. 0 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0 . dana yang masih ada di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0 dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp. 0

- Kas di Bank
Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-
- Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Manding per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-
- Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

b. Piutang

Saldo Piutang Lain-lain	Tahun Anggaran 2023 (Rp.)	Tahun Anggaran 2022 (Rp.)
Piutang Sewa Balai Kelurahan	0	0
Jumlah	0	0

piutang pada Tahun Anggaran 2023 dan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0

c. Persediaan

Persediaan	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0
Bahan Bakar dan Pelumas	140.000	0
Bahan Baku	0	0
Bahan Lainnya	1.289.000	0
Suku Cadang Alat Angkutan	0	0
Alat Tulis Kantor	245.000	750.000
Kertas dan Cover	55.000	55.000
Bahan Cetak	1.192.500	40.000
Benda Pos	150.000	0
Bahan Komputer	180.000	0
Perabot Kantor	704.500	0
Alat Listrik	520.000	60.000
Jumlah Persediaan	4.476.000	905.000

Jumlah persediaan Kelurahan Manding pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.476.000, sedangkan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 905.000

d. Investasi Jangka Panjang

Pada tahun 2023 dan tahun 2022 Kelurahan Manding tidak ada investasi jangka panjang

e. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	4.916.633.536,00	0,00	0,00	4.916.633.536,00
Peralatan dan Mesin	230.714.056,00	8.000.000,00	0,00	238.714.056,00
Gedung dan Bangunan	1.086.256.044,00	0,00	0,00	1.086.256.044,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aset Tetap Lainnya	3.066.500,00	0,00	0,00	3.066.500,00
Akumulasi Penyusutan	-254.701.011,13	-33.427.525,64	0,00	-288.128.536,77
Jumlah	5.982.169.124,87	-25.427.525,64	0,00	5.956.741.599,23

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp 5.956.741.599,23. Terdapat penambahan Aset Tetap pada Peralatan dan mesin Rp. 8.000.000,00 yaitu berasal dari belanja modal tahun 2023.

f. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut :

Aset Lainnya	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.000.000,00)	0,00	0,00	(3.000.000,00)

Aset lain-lain saldo awal dan akhir sebesar Rp3.000.000.

3.1.6. Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp.)
1.	Honorarium Tenaga Keamanan Bulan Des 2023	1.500.000
2.	Honorarium Tenaga Administrasi Bulan Des 2023	2.000.000
3.	Honorarium Tenaga Kebersihan Bulan Des 2023	1.500.000
4.	Belanja Telepon Penggunaan Bulan Des 2023	400.380
5.	Belanja Air Penggunaan Bulan Des 2023	19.000
6.	Belanja Listrik Penggunaan Bulan Des 2023	287.971
	JUMLAH	5.707.351

Jadi kewajiban jangka pendek Kelurahan Manding Rp. 5.707.351

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban. Saldo per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	5.977.380.902,87
2	Surplus / (Defisit) LO	(462.903.865,64)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	209.264.936,00
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	231.768.275,00
5	Ekuitas Akhir	5.955.510.248,23

Ekuitas akhir pada ekuitas akhir sebesar 5.955.510.248,23

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.000.000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.000.000	0
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	0
Belanja Tagihan Telepon	1.629.804	Belanja Tagihan Telepon	2.030.184	400.380
Belanja Tagihan Air	228.700	Belanja Tagihan Air	234.000	5.300
Belanja Tagihan Listrik	3.145.656	Belanja Tagihan Listrik	3.154.485	8.829
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.205.380	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.805.000	400.380

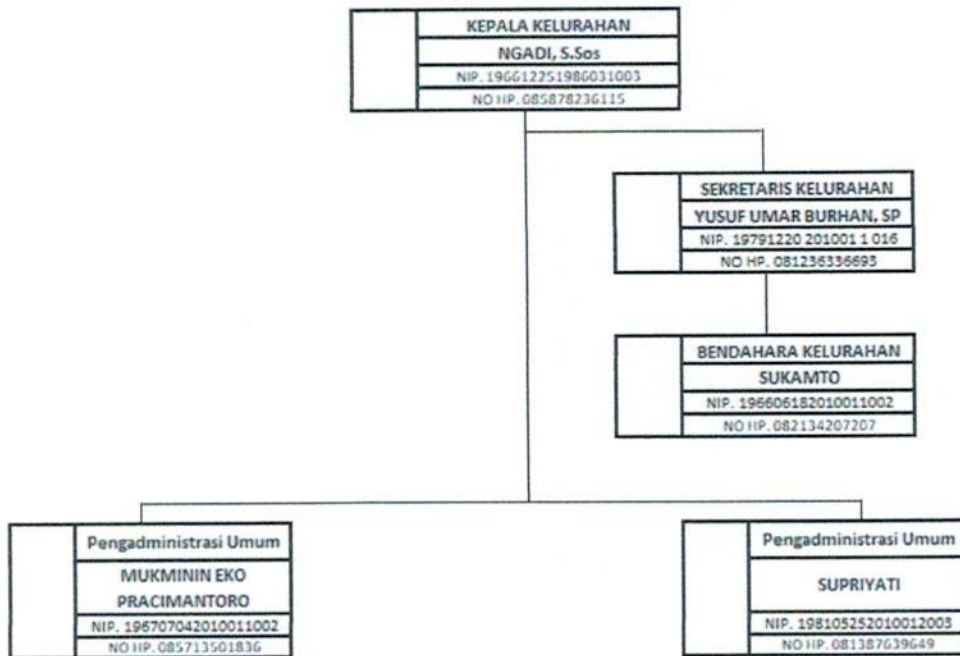
Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp 1.500.000,00, dan Rp 1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp 400.380,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp 0,00 dan Rp 400.380,00. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Air Rp 5.300,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 13.700,00 dan Rp 19.000,00. Pada pos Tagihan Listrik ada selisih Rp 8.829,00 karena adanya perbedaan utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 279.142,00 dan Rp 287.971,00. Sedangkan pada pos Tagihan Listrik ada selisih Rp 400.380,00 dengan perbedaan utang awal dan utang akhir Rp 400.380,00 dan Rp 0,00.

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

4.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MANDING TH. 2023
 KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MANDING TH. 2023
 KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG



BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip taat pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas dan profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas, namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

LURAH MANDING

(NGADI, S.Sos)
NIP. 19661225 198603 1 003